

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, dan Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Baskoro, Bambang Dwi, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001).
- Chazawi, Adami, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, (Bandung: Alumni, 2008).
- Danil, H. Elwi, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).
- Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Hiariej, Eddy O.S., Teori dan Hukum Pembuktian, (Yogyakarta: Erlangga, 2012).
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- _____, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Kristian, dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muladi, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).
- Renggong, Ruslan, Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Soerjono Soekanto dan Sj Mahmudji., 2004, Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Sutarto, Suryono dan Ny. Sri Oeripah Soejanto, Hukum Acara Pidana, Jilid II, (Semarang: Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1985).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Tahun 2010

Rancangan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal

Hariman Satria, Ke Arah Pergesaran Beban Pembuktian, (Jurnal INTEGRITAS
Volume 3, Nomor 1, Maret 2017).

Bambang Dwi Baskoro, Perseteruan KPK Dengan Polri Dalam Upaya
Pemberantasan Korupsi, (Jurnal MMH, Jilid 42, Juli 2013).

D. Website

Fachri Fachrudin "*Jadi Ahli Praperadilan Irman Gusman, Mantan Hakim MK
Jelaskan soal OTT dan Penangkapan*", diakses dari
[http://nasional.kompas.com/read/2016/10/27/19073711/jadi.ahli.praperadilan.
irman.gusman.mantan.hakim.mk.jelaskan.soal.ott.dan.penangkapan](http://nasional.kompas.com/read/2016/10/27/19073711/jadi.ahli.praperadilan.irman.gusman.mantan.hakim.mk.jelaskan.soal.ott.dan.penangkapan), pada 12
Desember 2017 pukul 15.00 WIB.

Ambaranie Nadia Kemala Movanita "*Kalah Kasasi, KPK Beri Ganti Rugi Rp 100
Juta ke Mantan Hakim Syarifuddin*", diakses dari
[http://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/13393431/kalah-kasasi-kpk-
beri-ganti-rugi-rp-100-juta-ke-mantan-hakim-syarifuddin](http://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/13393431/kalah-kasasi-kpk-beri-ganti-rugi-rp-100-juta-ke-mantan-hakim-syarifuddin), pada 12 Desember
2017 pukul 15.10 WIB.

Barda Nawawi Arief "*Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*", diakses
dari <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/>, pada 06 Juni 2017
pukul 02.00 WIB.

"*Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*" diakses dari
[https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-
pemberantasan-korupsi-di-indonesia](https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia), pada 02 April 2018 pukul 20.30 WIB

Eddy OS Hiariej "*Operasi Tangkap Tangan*"
[https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tan
gan](https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan), pada 02 April 2018 pukul 20.00 WIB

"*Penyadapan dan OTT KPK Sah dan Berdasarkan Undang-Undang*" diakses dari
[https://www.ramadhian-adibroto.com/penyadapan-dan-ott-kpk-sah-dan-
berdasarkan-undang-undang/](https://www.ramadhian-adibroto.com/penyadapan-dan-ott-kpk-sah-dan-berdasarkan-undang-undang/), pada 14 April 2018 pukul 18.50 WIB

Eddy OS Hiariej "*Memahami Analogi dan Ihwal OTT KPK*" diakses dari
[https://nasional.sindonews.com/read/1247918/18/memahami-analogi-dan-
ihwal-ott-kpk-1507857622/](https://nasional.sindonews.com/read/1247918/18/memahami-analogi-dan-ihwal-ott-kpk-1507857622/), pada 14 April 2018 pukul 18.55 WIB

Irmanputra Sidin “*OTT KPK Penting untuk Bersihkan Dunia Penegak Hukum dari Praktik Suap*” diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/08/pakar-hukum-ott-kpk-penting-untuk-bersihkan-dunia-penegak-hukum-dari-praktik-suap>, pada 14 April 2018 pukul 18.58 WIB

“*OTT KPK Ilegal: Ini Tanggapan Balik Prof. Romli untuk Prof. Eddy Hiariej*” diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum/romli-atmasasmita-dan-eddy-hiariej.html>, pada 14 April 2018 pukul 19.05 WIB

“*Yusril: KPK Genit seperti Toko Kelontong*” diakses dari <https://news.okezone.com/read/2016/11/15/337/1541923/yusril-kpk-genit-seperti-toko-kelontong>, pada 14 April 2018 pukul 19.07 WIB

Nathania Riris Michico “*Saksi Ahli Irman Gusman Sebut Istilah OTT Kekacauan Hukum Acara*” [https://news.detik.com/berita/d-3331225/saksi-ahli-irman-gusman-sebut-istilah-ott kacauan hukum-acara](https://news.detik.com/berita/d-3331225/saksi-ahli-irman-gusman-sebut-istilah-ott-kacauan-hukum-acara), pada 14 April 2018 pukul 19.10 WIB

LAMPIRAN